

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Livia Sikmon Putra¹⁾, Susi Susanti²⁾

Fakultas Syariah IAIN Kerinci^{1,2)}

E-Mail: livasikmonn@gmail.com¹⁾, susisusanti090987@gmail.com²⁾

ABSTRACT

Purpose: Rulers or leaders need to carry out supervision, because without supervision will result in deviations. The implementation of supervision, both seen from inspection, testing to investigation, has not been running effectively, this is due to the lack of timeliness in conducting supervision, the inaccurate data on deviations found for the supervisory apparatus at the District Inspectorate office. Kerinci. Basically, supervision is not intended to find fault and impose sanctions or penalties, but supervision is intended to find out the real reality regarding the implementation of organizational activities.

Design/Methodology/Approach: This research was conducted with a qualitative approach. Data obtained directly from the object of research with data collection techniques, namely the interview method.

Findings: The implementation of supervision has not been effective, this is due to the inaccuracy of time in conducting supervision, the inaccuracy of the deviation data found for the supervisory apparatus. Factors influencing the implementation of the Inspectorate's supervision in Kerinci Regency include officers who do not yet have good skills, the data used are not objective and unrealistic, and the lack of knowledge in the field of work being handled, even though the available facilities and infrastructure have supported the implementation of supervision.

Research implications: Based on the research results that have been achieved, it is known that the implementation of supervision has not been fully effective, therefore the findings from this research become an input for the Kerinci Regency Inspectorate to improve the ability of employees in order to optimize reporting time.

Keywords: Effectiveness; Supervision; Inspectorate

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidak tepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas di kantor Inspektorat Kab. Kerinci. Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi.

Desain/Methodologi/Pendekatan Penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara.

Hasil Penelitian: Pelaksanaan pengawasan belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap di Kabupaten Kerinci meliputi aparat petugas yang belum memiliki kemampuan yang baik data-data yang digunakan tidak obyektif dan tidak Realistis, dan minimnya pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani, padahal sarana dan prasarana yang tersedia telah mendukung pelaksanaan pengawasan.

Implikasi Hasil Penelitian: Atas hasil penelitian yang telah dicapai, maka diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan belumlah sepenuhnya efektif, oleh karena itu dengan adanya temuan dari hasil penelitian ini menjadi sebuah masukan bagi Inspektorat Kabupaten Kerinci untuk memperbaiki kemampuan para pegawai agar dapat mengoptimalkan waktu pelaporan.

Kata Kunci: Efektivitas; Pengawasan; Inspektorat

Detail Artikel :

Diterima : 26 September 2021

Disetujui : 15 Oktober 2021

PENDAHULUAN

Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atau yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results* (Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut) (Schermerhorn, 2002).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan. Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pada Kantor Inspektorat Daerah. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.

Karena pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat daerah, maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor Inspektorat daerah Kabupaten Kerinci ditekankan pada pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan.

Dalam pelaksanaan pengawasan kita mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 11 yang menguraikan bahwa inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta

Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, faktor-faktor tersebut dapat meliputi : aparat pengawas dan sarana/prasarana. Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan pelaksanaan tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Keadaan tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai yang tugasnya belum maksimal, sehingga terkadang pegawai lebih mengurus kepentingan pribadi atau golongannya.

Tugas Pokok dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci adalah Membantu Bupati Kerinci dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Kerinci, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan/desa serta Fungsinya adalah merumus kebijakan, pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan.

Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang selama ini belum dilakukan secara efektif. Alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan daerah yang selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat waktu, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kerinci.

Kemudian dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian pada bidang pengujian dan bidang penyimpangan yang sudah ditelusuri belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penyelidikan selanjutnya di samping itu pengujian yang telah dilakukan belum fleksibel, alasannya karena hasil pengujian yang sudah dilakukan belum terpusat dalam memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya efektivitas dalam penyelidikan terlihat belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan penyelidikan dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dampaknya tidak korektif dalam melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Kemudian dilihat dari faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat di Kabupaeten Kerinci adalah aparaturnya pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparaturnya pengawas (tenaga pemeriksa dan pengujian serta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang direncanakan. Dan selain itu pihak pengawas sudah memiliki kompetensi dalam menangani setiap pekerjaan yang ada pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci. Selanjutnya faktor sarana dan prasarana yang dilakukan selama ini dimiliki oleh Kantor

Inspektorat Kabupaten Kerinci sudah mendukung ketiga fungsi pengawasan. Sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor, komputer, sarana lainnya sudah menunjang aktivitas pengawasan yang ada pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Kerinci.

Tujuan pengawasan menurut Ukas (2004:337) yaitu sebagai berikut:

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Situmorang & Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
 - a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat

Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi, Kabuapten dan Kota. Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, Bupati dan Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya
3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya
4. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak
5. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah
6. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi
7. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP)
8. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelan-caran tugas pengawasan
10. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, dimana menganalisis suatu permasalahan dengan pendekatan yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer. Merupakan data yang penulis dapatkan secara langsung dari responden, data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2000).

2. Data Sekunder. Data skunder yaitu data yang penulis peroleh dari peraturan-peraturan, majalah, buku-buku, notulen rapat, catatan harian, selebaran atau arsip kegiatan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang di keluarkan oleh Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu dari:

1. Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci.
3. Pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci yang terkait.
4. Instansi lain sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kerinci

Pengumpulan Data

Beberapa cara yang dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data, antara lain Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Guna mendapat landasan ilmiah yang berbentuk teoritis yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku perkuliahan dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang dikerjakannya.

Penelitian Lapangan (*field Research*), metode ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu dengan cara observasi dan wawancara (*interview*).

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah mengamati secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Wawancara (*Interview*) yaitu kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informan (*interviewer*) dan sumber informan (*interviewee*). Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan panduan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kerinci 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kerinci. sub bagian perencanaan Inspektorat Kabupaten Kerinci. Inspektorat kabupaten mempunyai kewenangan yaitu :

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh Aparat pemerintahan daerah apakah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu pengawasan juga melakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, kabupaten kerinci mempunyai misi “Kerinci Sejahtera, Damai dan Agamis Berbasis Ekonomi

Kerakyatan” yang dijabarkan pada visi Inspektorat Kabupaten Kerinci sebagai Berikut “Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN Melalui Pengawasan Yang Profesional”.

Rumusan misi merupakan salah satu factor penting untuk mengarahkan operasional Inspektorat Kabupaten Kerinci sehingga dapat terus eksis dalam mencapai tujuan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan dan bentuk implementasi visi Inspektorat Kabupaten Kerinci mempunyai misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan permasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP)
3. Meningkatkan sinergi pengawasan.
4. Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah.

Berangkat dari visi dan misi tersebut Ir. Rapik Orba, ME selaku Inspektur Kabupaten Kerinci selalu menegas kepada tim yang akan diterjunkan di lapangan untuk selalu meningkatkan kinerja yang semaksimal mungkin, baik menyangkut pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan terhadap semua SKPD ataupun sekolah-sekolah di kabupaten kerinci, sehingga penyerapan dana oleh setiap SKPD dapat terserap sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan selalu mengawasi setiap titik-titik bakal timbulnya kebocoran atau penyalahgunaan anggaran, selain itu juga akan terus melakukan SIDAK (Inspeksi Mendadak) kesemua kantor-kantor guna meningkatkan disiplin setiap aparatur, juga menghimbau kepada seluruh instansi atau dinas yang berhubungan langsung dengan publik untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat luas.

Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pada Kantor Inspektorat. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya.

Pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci, maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan oleh kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan telah sesuaikah dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor Inspektorat daerah Kabupaten Kerinci ditekankan pada pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Adapun hasil penilaian efektivitas dari masing-masing pelaksanaan pengawasan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam melakukan pemeriksaan oleh kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan Apratur pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan serta kesejahteraan sosial. Alasan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh keempat bidang dalam pemerintahan daerah (bidang Aparatur, Pembangunan, Keuangan dan Bidang Kesejahteraan Sosial) dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan khususnya di Kabupaten Kerinci.

Penilaian efektivitas dalam melakukan pemeriksaan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Saktian selaku Kasi Pengawasan Pemerintah bidang pembangunan, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa

”Dalam melakukan pemeriksaan dalam bidang pembangunan belum terkoordinasi dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan yang belum terkoordinasi dengan baik karena setiap tenaga pemeriksaan (pegawai) belum menetapkan bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi, dan selain itu belum adanya pemeriksaan obyektif yang harus dilakukan dalam melakukan pemeriksaan”.

Kemudian wawancara dengan bapak Rafik Orba, ME. selaku Inspektur pada Inspektorat di Kabupaten Kerinci yaitu sebagai berikut:

”Disamping dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa dimana tidak terkoordinasi adalah pihak tenaga pemeriksa belum memenuhi bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi seperti bidang aparatur, bidang pembangunan, bidang keuangan dan bidang kesejahteraan sosial”.

Selanjutnya wawancara dengan Kasi Pengawas Pemerintah bidang pemerintahan dan kemasyarakatan Jonardi S.Pd yaitu sebagai berikut :

”Dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas oleh pemerintah daerah seringkali tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan”.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Inspektur Rafik Orba,ME. pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci, mengenai sistem pemeriksaan dalam pengawasan kinerja pemerintahan daerah yaitu sebagai berikut :

”Sistem pemeriksaan yang selama ini dilakukan belum fleksibel, alasannya karena dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah belum mampu mengungkap kondisi yang seringkali terjadi. Contohnya kondisi ekonomi yang selama ini terjadi”.

Pak Armidi Kepala BKD Kerinci juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh instansi Inspektorat Kab. Kerinci memang belum optimal yang mana pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksana tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan permasyarakatan, Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP), meningkatkan sinergi pengawasan. Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah belum berjalan dengan baik hal itu dapat dibuktikan dengan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Keluar Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip Kab. Kerinci) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Reguler). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan sama sekali tidak berjalan dengan efektif dan bahkan terkesan ditunda-tunda.

Berdasarkan hasil penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci maka penilaian selanjutnya dalam melakukan efektivitas pengujian dalam menerapkan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, akan disajikan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Saktian. selaku Kasi Pengawasan Pemerintah dalam bidang pembangunan yaitu sebagai berikut :

”salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengujian adalah data yang tidak akurat, dimana data yang diperoleh belum dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengujian dan valid. Sehingga salah satu faktor yang menyebabkan adanya ketidakakuratannya informasi yang diperoleh di lapangan dan selain itu adanya keterbatasan setiap pihak di dalam memberikan informasi”.

Kemudian wawancara dengan Bapak Jonardi S.Pd selaku Kasi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan :

”dalam melakukan pengujian dengan sejumlah informasi yang diperoleh tidak obyektif, dimana pengujian atas sejumlah informasi yang diterima tidak sesuai dengan bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan karena adanya keterbatasan sejumlah informasi yang ada di lapangan dan selain itu belum adanya koordinasi yang terlibat langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah”.

Aktivitas pelaksanaan pengawasan selain daripada pemeriksaan dan pengujian juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan pengusutan. Oleh karena itulah perlu ditunjang oleh adanya penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Rafik Orba selaku Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci, Kepulauan dapat diuraikan sebagai berikut :

”salah satu tujuan yang dilakukan dalam melakukan pengusutan adalah untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan atas penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengadaan atau informasi dari berbagai pihak”.

Kemudian dilihat dari hasil pemeriksaan mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan pengawasan maka akan disajikan hasil wawancara dengan Kasi Pengawas Pemerintah bidang pembangunan Bapak Drs. Saktian yaitu sebagai berikut :

”dalam pelaksanaan penyelidikan belum tepat waktu. Hal ini disebabkan karena lambatnya informasi yang diterima dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian dari setiap data yang dijadikan obyek pengawasan”.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Zainal Efendi, Sp, Msi. selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kerinci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

“dalam melakukan penyelidikan nampak belum tepat, alasannya karena dalam melakukan penyelidikan tenaga penyidik khususnya pada Kantor Inspektorat di Kabupaten nampaknya belum didasari berdasarkan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi”.

Kemudian pelaksanaan penyelidikan khususnya pada Kantor Inspektorat yang selama ini belum dilakukan secara tepat/efektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Inspektur Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci yaitu:

”Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh karyawan Inspektorat selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan penyelidikan belum terpusat dalam bidang-bidang penyimpangan yang terjadi dan selain itu pelaksanaan penyelidikan belum dilakukan secara tepat waktu”.

Bapak Syahmil DPT Subag Umum dan Kepegawaian BKD juga menyatakan bahwa Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

“Pengadministrasian laporan hasil pengawasan; Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; Penyusunan statistic hasil pengawasan; Penyelenggaraan kerja sama pengawasan juga tidak berjalan secara sinergi yang mana Inspektorat berjalan secara sendiri-sendiri dan bekerja secara tidak maksimal”.

Dalam UU. No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 11 yang menguraikan bahwa inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya.

Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, faktor-faktor tersebut dapat meliputi : aparat pengawas dan sarana/prasarana,.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dari hasil wawancara dengan Rofik Orba selaku Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci yaitu sebagai berikut:

”Penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah dapat terlaksana jika ditunjang oleh tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dari pekerjaan yang ditangani dan selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan”.

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa aparatur pengawas dalam menangani setiap pekerjaan yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan memiliki rasa tanggungjawab dalam penyelenggaraan pekerjaan di bidang pengawasan kinerja pemerintah bidang pemerintahan dan kemasyarakatan kemudian Bapak Zainal Efendi, Sp, Msi. selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kerinci menjelaskan sebagai berikut: Penyelenggaraan pengawasan sudah ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana, seperti :

”Pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Kantor Inspektorat Kabuptaen Kerinci selama ini sudah ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana, seperti perlengkapan kantor, komputer dan alat-alat lainnya yang mendukung pekerjaan lainnya dalam penanganan pekerjaan di bidang fungsi pengawasan”.

Kemudian wawancara lainnya dengan Musliadi, SE Bagian Umum dan Perlengkapan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci yaitu :

”Perlengkapan yang ada di Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci sudah tersedia secara lengkap dan mendukung aktivitas fungsi pengawasan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa faktor yang menunjang terhadap pelaksanaan pengawasan. Sebab berhasil/ tidaknya suatu visi dan misi Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengawasan

adalah Aparatur Pengawasan dalam mengerjakan pekerjaan dibidang pengawasan dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pengawasan kinerja Pemerintahan Daerah khususnya pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci”.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci. Dimana indikator penilaian yang digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, maka penulis menetapkan indikator dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karena itulah dalam pembahasan digunakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi titik pokok dalam pembahasan adalah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Kerinci.

Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang selama ini belum dilakukan secara efektif. Alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan daerah yang selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, tidak tepat waktu salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususnya di Kabupaten Kerinci

Kemudian dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian dari masing-masing bidang pengujian dari masing-masing bidang penyimpangan yang sudah ditelusuri belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penyelidikan selanjutnya di samping itu pengujian yang telah dilakukan belum fleksibel, alasannya karena hasil pengujian yang sudah dilakukan belum terpusat dalam memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya efektivitas dalam penyelidikan terlihat belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan penyelidikan dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dampaknya tidak korektif dalam melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Kemudian dilihat dari faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci adalah aparat pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparat pengawas (tenaga pemeriksa dan pengujian serta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang

direncanakan. Dan selain itu pihak pengawas sudah memiliki kompetensi dalam menangani setiap pekerjaan yang ada pada Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci.

Selanjutnya faktor sarana dan prasarana yang dilakukan selama ini yang dimiliki oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci sudah mendukung ketiga fungsi pengawasan. Sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor, komputer, sarana lainnya sudah menunjang aktivitas pengawasan yang ada pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap di Kabupaten Kerinci adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill sehingga adanya permasalahan Ketepatan Waktu (pelaksanaan Pengawasan banyak tertunda-tunda, Obyektivitas (data-data yang digunakan tidak obyektif), tidak Realistis, dan minimnya pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani padahal telah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat di Kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta
- Gie, The Liang. Adminidtrasi *Perkantoran Moderen*. Radya Indra, Yogyakarta : 1980
- Hasan, M Tolchah, dkk. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif (Tinjauan Teoritis dan Praktis), penerbit : Lpunsima : Malang
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasa.
- Kantour Ronie, Metode Penelitian, Jakarta, 2003.
- Manullang, 2006, Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nasution Mustafa Edwin dan Hardius Usman, 2008, Proses Penelitian Kuantitatif, edisi ketiga, cetakan ketiga, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negri Sipil.

- Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, Dasar-dasar Manajemen, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, cetakan keempat, Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Siswandi dan Indra Iman, 2009, Aplikasi Manajemen Perusahaan, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta
- Siagian P. Sondang, 2008, Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Sarwoto, 2010, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudjiwo. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung : Mandar Maju
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, Dasar-dasar Manajemen, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakart
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Yogyakarta.